



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409217/2022**



DS:7030-3280-0010-6375

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (18) | SULAWESI TENGAH |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409217) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU |
| Sebesar | : Rp. | 1.787.606.000 (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.787.606.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN PALU | (051) Rp. | 1.787.606.000 |
|--------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022



DS:7030-3280-0010-6375

Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	147.855.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	147.855.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.639.751.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.639.751.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



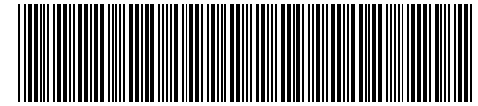
DS:7030-3280-0010-6375

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			147.855.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			147.855.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	85.226.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	85.226.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	62.629.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	62.629.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.639.751.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.639.751.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12,00	Kelompok Masyarakat	145.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	10,00	Kelompok Masyarakat	112.030.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	32.970.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7030-3280-0010-6375

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		12,00	Lembaga	75.409.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	12,00	Lembaga	75.409.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan	104.612.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	104.112.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	Layanan	500.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		139,00	Orang	1.112.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	139,00	Orang/Kasus	1.112.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		19,00	Kelompok Masyarakat	202.730.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	19,00	Kegiatan	202.730.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022



DS:7030-3280-0010-6375

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I B. 1

		Pagu			Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	1.787.606.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.787.606.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7030-3280-0010-6375

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409217	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	-	1.787.606	-	-	-	1.787.606		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	147.855	-	-	-	147.855		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	147.855	-	-	-	147.855		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	85.226	-	-	-	85.226	18.51	
01	RM	-	85.226	-	-	-	85.226	051	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	62.629	-	-	-	62.629	18.51	
01	RM	-	62.629	-	-	-	62.629	051	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.639.751	-	-	-	1.639.751		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.639.751	-	-	-	1.639.751		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	145.000	-	-	-	145.000	18.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7030-3280-0010-6375

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	145.000	-	-	-	145.000	051	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	75.409	-	-	-	75.409	18 . 51	
01 RM		-	75.409	-	-	-	75.409	051	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	104.612	-	-	-	104.612	18 . 51	
01 RM		-	104.612	-	-	-	104.612	051	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	1.112.000	-	-	-	1.112.000	18 . 51	
01 RM		-	1.112.000	-	-	-	1.112.000	051	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	202.730	-	-	-	202.730	18 . 51	
01 RM		-	202.730	-	-	-	202.730	051	
JUMLAH		-	1.787.606	-	-	-	1.787.606		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7030-3280-0010-6375

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

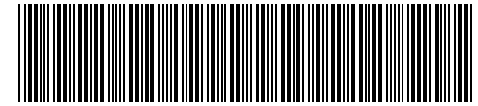
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409217	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	9.267	410.632	156.509	137.696	217.885	149.533	166.552	196.493	140.692	118.715	83.633	1.787.606
		BELANJA BARANG	0	9.267	410.632	156.509	137.696	217.885	149.533	166.552	196.493	140.692	118.715	83.633	1.787.606
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	9.267	27.848	20.665	20.663	9.444	0	9.697	13.052	17.054	10.933	9.233	147.855
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	9.267	27.848	20.665	20.663	9.444	0	9.697	13.052	17.054	10.933	9.233	147.855
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	0	382.784	135.844	117.033	208.441	149.533	156.855	183.441	123.638	107.782	74.400	1.639.751
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	382.784	135.844	117.033	208.441	149.533	156.855	183.441	123.638	107.782	74.400	1.639.751

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022
IV A. B L O K I R**



DS:7030-3280-0010-6375

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409217] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

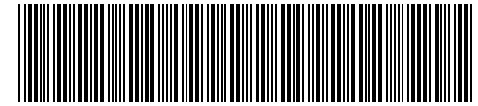
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:7030-3280-0010-6375

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409217] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001